

RINGKASAN

Otonomi daerah memiliki dampak positif khususnya bagi pemerintahan daerah, dengan adanya otonomi daerah ini maka pemerintah daerah secara otomatis memiliki kesempatan untuk mengembangkan identitas lokal yang ada di masyarakat, seperti halnya pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat menjadi tolak ukur apakah suatu negara tersebut menjadi negara maju, berkembang atau tertinggal. Tingginya angka pembangunan dapat menandakan suatu negara telah dapat mensejahterakan masyarakat. Pembangunan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para pencari kerja, pembangunan dapat memberikan kesempatan untuk mencari pundi-pundi uang sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Akan tetapi, dalam pembangunan rentan adanya suap-menyuap atau korupsi yang dalam perkembangannya semakin terstruktur, sistematis, masif dan menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga memberikan kerugian materiil kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pemerintah perlu menerapkan strategi menanggulangi tindak pidana korupsi untuk mengoptimalkan penggerakan roda perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis kualitatif. Diperoleh hasil penelitian bahwa Peran Kejaksaan dalam melakukan Pengawasan, Pengamanan dan Pendampingan Pembangunan Strategis dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaannya sudah dilakukan sesuai dengan peraturan Keputusan Jaksa Agung No.KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia yaitu dengan melakukan upaya *preventif* dan *represif*, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya kurangnya pahami *stakeholder* terkait teknis dari TP4D sendiri.

Kata Kunci : Peran Kejaksaan, Pembangunan, Pencegahan, Korupsi, Kabupaten Banyumas.

SUMMARY

Regional autonomy has a positive impact, especially for local governments, with this regional autonomy, local governments automatically have the opportunity to develop local identities that exist in the community, such as development. The success of development can be a benchmark for whether a country becomes a developed, developing or lagging country. The high rate of development can indicate a country has been able to prosper the community. Development has a significant impact on job seekers, development can provide an opportunity to seek money coffers so that the unemployment rate can be reduced. However, in development it is vulnerable to bribery or corruption which in its development is increasingly structured, systematic, massive and shows a significant increase so as to provide material losses to the community. The purpose of this study is to emphasize that the government needs to implement a strategy to tackle corruption in order to optimize the driving force of the economy for the welfare of the community. The research method used in this thesis is a sociological juridical approach with qualitative analysis. The results of the study showed that the role of the Prosecutor's Office in carrying out Escort, Security and Assistance for Strategic Development in the Prevention of Corruption Crimes in Banyumas Regency in its implementation has been carried out in accordance with the regulations of the Attorney General's Decree No.KEP-152/A/JA/10/2015 concerning Team Formation. Government Guards and Security and Development of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, namely by carrying out preventive and repressive efforts, but in its implementation there are several obstacles including the lack of understanding of stakeholders related to technical aspects of TP4D itself.

Keywords: The Role of the Prosecutor's Office, Development, Prevention, Corruption, Banyumas Regency.